

## Dewan Djambi sementara: Menegosiasikan ulang kesultanan Jambi masa revolusi Indonesia 1945-1949

M. Taofik Kurohman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920542552&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Revolusi kemerdekaan di Jambi berbeda dengan semangat revolusi sosial di daerah-daerah lain. Konflik politik lokal di Jambi didasarkan kepada rasa kecewa yang muncul di kalangan elite tradisional Jambi kepada para elite baru Republikan yang berasal dari luar Jambi. Dari hal itu, muncul narasi mengenai pemulihian Kesultanan Jambi yang telah hancur sebelumnya pada rangkaian Perang Jambi 1900-1907. Upaya-upaya politis antara Pemerintah Jambi dengan Pemerintah Republik Indonesia ataupun Belanda dilakukan untuk memecahkan permasalahan politik di Jambi. Dengan menggunakan metode historis yang menekankan pada proses dan waktu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Djambi Sementara adalah sebuah badan yang dibentuk untuk menjadikan Jambi sebagai daerah istimewa dalam sistem federal yang sedang dibentuk oleh Belanda. Tuntutan utama dari Dewan Djambi Sementara adalah menjadikan Jambi sebagai daerah otonom dengan cara memulihkan Kesultanan Jambi dan berpisah dari Provinsi Sumatra Tengah yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perjalannya, tuntutan Dewan Djambi Sementara tidak tercapai karena terhalang oleh sikap Belanda yang ragu memberi dukungan terhadap pembentukan sebuah daerah dengan sistem feudal dan juga terhalang oleh perkembangan politik antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang dituangkan melalui Perjanjian Roem-Royen. Tuntutan akan pemulihian kesultanan dan pemberian hak otonom itu menguap bersamaan dengan peralihan administrasi antara Belanda ke Republik Indonesia, sebagaimana hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Namun, semangat regionalisme Jambi yang menuntut otonomi daerah itu tetap dilanjutkan pada masa Republik Indonesia melalui organisasi-organisasi pemuda dan kedaerahan hingga akhirnya berhasil mendapatkan status sebagai daerah otonom setingkat provinsi pada 1957.

.....The independence revolution in Jambi was distinct from the spirit of social revolution in other regions. A sense of disappointment among Jambi's traditional elites towards the new Republican elites from outside Jambi caused local political conflict in Jambi. Accordingly, the narrative of the restoration of the Jambi Sultanate, which had been destroyed during the Jambi War of 1900-1907, emerged. Political efforts were made between the Jambi Government and the Government of the Republic of Indonesia or the Netherlands to solve political problems in Jambi. Using historical methods that focus on the process and time, the study shows that the Dewan Djambi Sementara was a council to make Jambi a particular region in the federal system, which the Dutch established at that time. The primary demand of the Dewan Djambi Sementara was to make Jambi an autonomous region by restoring the Jambi Sultanate and separating it from the Central Sumatra Province formed by the Government of the Republic of Indonesia. However, the demands of the Dewan Djambi Sementara were not accomplished because the Dutch hesitantly supported forming a region with a feudal system. In addition, political developments between the Republic of Indonesia and the Dutch, described in the Roem-Royen agreement, hindered the process. The demands for the sultanate restoration and the granting of autonomous rights vanished along with the administrative transfer from the Netherlands to the Republic of Indonesia due to the Round Table Conference in The Hague. Despite this setback, the

spirit of Jambi regionalism that demanded regional autonomy was continued in youth and regional organizations during the Republic of Indonesia era. The endeavors of these organizations eventually made an autonomous region at the provincial level in 1957.